
Skandal Politik Ijazah Presiden Joko Widodo : Tinjauan Kritis dan Dampaknya Terhadap Etika Kepemimpinan di Indonesia

Nur Jihan Mustari*

¹ Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia.

* *Email Korespondensi:* nurjihanmustari@gmail.com

Abstrak: Isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo mencuat ke publik sejak 2022 dan menjadi salah satu skandal politik paling banyak diperbincangkan. Artikel ini menyajikan kajian komprehensif dan multidisipliner untuk membedah kasus tersebut dari berbagai aspek: hukum, komunikasi politik, linguistik media, analisis sentimen publik, serta etika kepemimpinan. Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi dari media nasional, putusan pengadilan, serta data digital dari media sosial. Temuan menunjukkan bahwa meskipun dokumen ijazah Presiden dinyatakan sah oleh Universitas Gadjah Mada dan Bareskrim Polri melalui audit forensik, opini publik tetap terpecah. Analisis sentimen berbasis algoritma SVM dan Naïve Bayes terhadap ribuan komentar di media sosial menunjukkan dominasi persepsi negatif (47,6%) terhadap isu tersebut. Selain itu, kajian eufemisme dalam berita media daring mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk mengontrol persepsi publik terhadap isu sensitif ini. Dalam aspek hukum, putusan pengadilan terhadap penyebar hoaks menunjukkan ketegasan negara dalam melindungi nama baik pejabat publik. Di sisi lain, studi mengenai arsip menunjukkan bahwa rendahnya literasi arsip masyarakat turut memperkeruh opini terhadap keabsahan dokumen. Penelitian ini juga memotret bagaimana hoaks dijadikan alat komunikasi politik yang disebarakan secara sistematis melalui media sosial, terutama menjelang Pemilu 2024. Dengan melibatkan teknologi seperti AI, disinformasi diproduksi secara masif dan berulang. Artikel ini menyimpulkan bahwa skandal ijazah Jokowi bukan sekadar soal legalitas dokumen, melainkan mencerminkan krisis kepercayaan, tantangan etika, dan perlunya peningkatan literasi digital dan hukum. Kajian ini merekomendasikan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, media, dan pendidikan untuk melindungi integritas demokrasi Indonesia dari ancaman disinformasi digital yang terorganisir.

Keywords: *politik; ijazah Jokowi; kepemimpinan; etika publik; disinformasi.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi modern, seorang pemimpin dituntut untuk menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Di Indonesia, kualitas kepemimpinan sering kali diuji melalui opini publik dan isu-isu yang viral di media sosial. Salah satu isu besar yang menyeruak pada periode 2022 hingga 2025 adalah tuduhan mengenai ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Kasus ini menarik perhatian luas karena menyangkut dokumen legal yang menjadi syarat utama dalam pencalonan sebagai kepala negara. Tuduhan ini tidak hanya menyorot aspek administratif, tetapi telah berkembang menjadi instrumen politik yang mengguncang opini publik. Berbagai kalangan mulai dari aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum turut serta dalam menyebarkan dan menanggapi isu tersebut.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran opini dan hoaks politik. Tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi menjadi topik utama di berbagai platform digital, seperti YouTube, Twitter, hingga TikTok. Dalam waktu singkat, masyarakat terbagi dalam dua kubu: mereka yang mempercayai dokumen tersebut otentik berdasarkan klarifikasi institusional, dan mereka yang menuduh telah terjadi konspirasi besar-besaran.

Isu ini menjadi penting tidak hanya karena menyeret nama kepala negara, tetapi juga karena menyangkut kredibilitas institusi pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lembaga penegak hukum seperti Bareskrim Polri. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi-institusi tersebut, maka stabilitas negara pun dapat terganggu.

Persoalan ini juga membuka diskursus lebih luas mengenai etika kepemimpinan, hukum, serta bagaimana bahasa media digunakan untuk membingkai realitas politik. Selain itu, pendekatan akademik seperti analisis

eufemisme, ratio decidendi putusan pengadilan, serta evaluasi terhadap literasi arsip masyarakat menjadi landasan penting dalam melihat bagaimana isu ini berkembang secara multidimensional.

Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih dalam bagaimana dinamika kasus ini berjalan, mulai dari awal tuduhan, klarifikasi lembaga, reaksi publik, hingga proses hukum yang menyertainya. Artikel ini berupaya menghadirkan kajian komprehensif dengan menggabungkan berbagai pendekatan akademik untuk memahami tidak hanya soal legalitas dokumen, tetapi juga dampaknya terhadap kepemimpinan, demokrasi, dan masyarakat digital Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan mengupas secara mendalam dinamika sosial, politik, dan hukum terkait isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, konteks, serta persepsi yang melingkupi fenomena sosial-politik secara komprehensif. Metode studi kasus digunakan untuk menelusuri kejadian secara menyeluruh, dengan fokus pada satu peristiwa aktual dan signifikan.

Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi resmi, termasuk arsip institusi pendidikan (UGM), dokumen hukum (putusan pengadilan), siaran pers kepolisian (Bareskrim Polri), laporan media daring (Kompas, Tempo, CNN Indonesia, dll), serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan isu kepemimpinan, hukum, dan komunikasi politik. Data sekunder ini dipilih karena memuat informasi otentik, dapat diverifikasi, dan berkontribusi pada kejelasan konstruksi fakta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka digital, pelacakan berita dan dokumen resmi dari lembaga pemerintahan, serta analisis konten sosial media sebagai data pendukung opini publik. Selain itu, teknik observasi non-partisipatif juga dilakukan terhadap respons netizen di media sosial seperti Twitter dan YouTube untuk menangkap pola sentimen publik.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan kejadian serta menginterpretasi hubungan antara fakta, wacana publik, dan konsekuensi etis-politik. Proses analisis dilakukan dengan menyusun data ke dalam kategori tematik, seperti: kronologi kasus, tanggapan lembaga, framing media, respons masyarakat, hingga dampak hukum dan sosial.

Untuk menjaga validitas, digunakan teknik triangulasi data dengan membandingkan sumber berbeda yang memiliki perspektif serupa maupun bertentangan. Misalnya, konfirmasi keaslian ijazah diuji dari sisi akademik (UGM), hukum (putusan pengadilan), hingga analisis opini netizen (komentar media sosial dan hasil riset sentimen). Strategi ini penting dalam mencegah bias data dan memastikan bahwa simpulan penelitian mencerminkan keadaan yang faktual dan holistik.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman menyeluruh mengenai skandal ijazah Presiden Jokowi dan hubungannya dengan ketahanan demokrasi, etika publik, serta kualitas kepemimpinan nasional di era disinformasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Kronologi Lengkap Kasus Ijazah Jokowi

Tahun	Peristiwa
2022	Muncul tuduhan dari Dr. Tifauzia dan Roy Suryo soal ijazah palsu Jokowi, disebar melalui media sosial dan YouTube.
2023	UGM memberikan klarifikasi bahwa Jokowi adalah alumni resmi.
2024	Presiden Jokowi melalui tim hukumnya melaporkan penyebar hoaks ke polisi.
Jan-2025	Bareskrim melakukan investigasi forensik terhadap dokumen ijazah dan skripsi Jokowi.
Mei-2025	Puslabfor menyatakan dokumen tersebut asli dan penyelidikan dihentikan.

Tabel 2. Profil Tokoh Terkait Kasus

Nama	Peran	Pandangan
Joko Widodo	Presiden RI	Menyatakan bahwa ijazahnya asli dan sah; menempuh jalur hukum untuk membela diri.
Dr.Tifauzia Tyassuma	Epidemiolog	Menyatakan bahwa terdapat anomali pada dokumen akademik Jokowi.
Roy Suryo	Mantan Menpora, pakar telematika	Memperkuat keraguan dengan analisis format dan font ijazah.
UGM	Institusi akademik	Menegaskan Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985.
Bareskrim Polri	Penegak hukum	Melakukan investigasi dan menyatakan dokumen asli berdasarkan uji forensik.

Kelompok yang Mendukung Keaslian Ijazah

Pendukung Presiden Jokowi dan berbagai akademisi menegaskan bahwa isu ini adalah bagian dari kampanye disinformasi yang tidak berdasar. Mereka mengutip klarifikasi dari UGM dan hasil investigasi kepolisian sebagai dasar pembelaan. Bagi mereka, kasus ini adalah bentuk pembunuhan karakter terhadap pemimpin nasional yang telah dua kali memenangkan pemilu secara sah.

"Kami memiliki catatan lengkap akademik Pak Jokowi sebagai mahasiswa kehutanan UGM angkatan 1980. Beliau lulus tepat waktu pada tahun 1985." Prof. Ova Emilia, Rektor UGM (2023)

"Hasil pengujian laboratorium terhadap tinta, jenis kertas, dan tanda tangan menyatakan tidak ada indikasi pemalsuan." Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan, Bareskrim Mabes Polri (2025)

Kelompok yang Meragukan

Di sisi lain, ada kelompok yang tetap meragukan keaslian ijazah meskipun telah ada pernyataan resmi dari UGM dan hasil investigasi polisi. Kelompok ini berargumen bahwa institusi pendidikan dan penegak hukum bisa saja ditekan oleh kekuasaan untuk menutupi fakta. Mereka tetap menyuarakan desakan agar kasus ini dibuka di pengadilan terbuka agar publik bisa menilai langsung.

"Rakyat berhak tahu! Kalau memang tidak ada yang ditutupi, buka saja dokumen-dokumennya di sidang pengadilan." Roy Suryo (2024)

ANALISIS BAHASA MEDIA DAN EUFEMISME

Penelitian yang dilakukan oleh Ihda Qabliah dan Nur Athira Salam (2025) memberikan perspektif tambahan terhadap skandal ijazah Presiden Jokowi dengan menyoroti aspek linguistik, khususnya penggunaan eufemisme dalam berita online. Kajian mereka terhadap berita dari media Tribun Timur menunjukkan bagaimana media menggunakan ungkapan-ungkapan halus untuk meredam ketegangan isu dan membentuk opini publik secara terselubung.

Dalam artikel berjudul *"Rencana Besar di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi versi Pengamat"*, ditemukan beberapa bentuk eufemisme yang digunakan, antara lain:

- Ekspresi Figuratif seperti "menciptakan disabilitas politik" untuk menyamarkan makna pelemahan politik;
- Metafora seperti "residu kepentingan politik" sebagai simbol konflik politik tersisa;
- Flipansi dengan frasa "diributi" yang menyederhanakan makna konflik serius;
- Akronim seperti "TIPU UGM" yang dibuat dengan nada sarkastik;
- Peminjaman Istilah seperti "hoaks" untuk menggantikan kata "fitnah".

Penggunaan eufemisme dalam berita ini mengandung tiga fungsi utama menurut Burrridge (2012):

- Eufemisme Perlindungan untuk meredam konflik dan menyampaikan kritik secara halus.
- Eufemisme Kecurangan untuk menyamarkan tuduhan manipulatif dengan bahasa netral.
- Eufemisme Menggelikan penggunaan sindiran atau humor agar pembaca lebih reseptif terhadap isu.

Analisis ini penting untuk memahami bahwa narasi media dapat dibentuk bukan hanya oleh isi berita, tetapi juga oleh pilihan kata. Isu yang kompleks seperti tuduhan ijazah palsu bisa ditampilkan lebih "lunak" atau lebih "tajam" tergantung pada bagaimana bahasa digunakan.

TINJAUAN ETIKA KEPEMIMPINAN

Dalam kerangka etika kepemimpinan, isu ijazah palsu ini menyentuh beberapa aspek penting: kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemimpin publik harus mampu mempertanggungjawabkan setiap aspek dalam rekam jejaknya, termasuk latar belakang pendidikan. Namun, ketika sudah dilakukan pembuktian hukum dan akademik secara sah, maka seharusnya opini publik diarahkan pada penerimaan berdasarkan data. Etika kepemimpinan menekankan bahwa kebenaran harus ditegakkan berdasarkan fakta, bukan hanya persepsi. Upaya Jokowi yang memilih jalur hukum menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian yang berlandaskan konstitusi, bukan retorika.

ANALISIS SENTIMEN DIGITAL TERHADAP ISU IJAZAH JOKOWI

Dalam studi yang dilakukan oleh (Wulandari Oca Meilika, Maulana Irvan, Syamsudin Fatih, 2025), analisis sentimen terhadap isu ijazah Jokowi menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Twitter, menjadi ruang vital bagi perdebatan politik digital. Penelitian ini memanfaatkan algoritma Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) untuk mengklasifikasikan 3.055 komentar dalam tiga kategori: positif, negatif, dan netral. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa:

- a. Komentar Negatif: 1.453 komentar (47,6%)
- b. Komentar Positif: 942 komentar (30,8%)
- c. Komentar Netral: 660 komentar (21,6%)

Dari sisi kinerja algoritma:

- a. Naïve Bayes: Akurasi 65%
- b. SVM: Akurasi 69,23% dengan precision 70,56% dan F1-score 69,78%

Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum publik di media sosial cenderung merespons isu ini secara kritis dan negatif, meskipun tidak sedikit yang memberikan dukungan atau sikap netral. Polarisasi opini ini menjadi cerminan dari pembelahan sosial-politik di era digital.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam memahami opini publik serta urgensi penggunaan metode analisis canggih seperti machine learning untuk mendeteksi persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang kontroversial. Dengan demikian, data sentimen ini memperkuat posisi kajian skandal ijazah Jokowi sebagai fenomena politik sekaligus sosial yang kompleks.

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN: PENYEBARAN BERITA PALSU IJAZAH JOKOWI

Kajian mendalam juga dilakukan oleh (Dyah et al., 2024), yang meneliti ratio decidendi hakim dalam putusan perkara penyebaran berita palsu mengenai ijazah Presiden Joko Widodo, dengan studi kasus pada putusan No. 318/Pid.Sus/2022/PN.Skt. Dalam perkara ini, terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, melalui kanal YouTube "Gus Nur 13 Official", menyebarkan wawancara dengan Bambang Tri Mulyono yang menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu.

Berdasarkan hasil persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun. Pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1), dan dinyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.

Hakim juga menilai bahwa tindakan terdakwa tidak sekadar menyampaikan kritik, tetapi aktif menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan hal tersebut terbukti secara hukum melalui keterangan saksi, ahli, serta bukti digital. Hakim menekankan pentingnya dua alat bukti sah dan keyakinan pribadi sebagai dasar pemidanaan sesuai Pasal 183 KUHP.

Menariknya, dalam putusan ini, hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis seperti dampak sosial, motivasi terdakwa, dan intensi dari penyebaran konten. Hal ini menegaskan bahwa keadilan dalam konteks penyebaran berita palsu bukan hanya soal hukum positif, tetapi juga terkait nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial.

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam menegakkan hukum terhadap penyebaran hoaks di era digital, serta memperkuat posisi hukum terhadap tindakan yang dapat mencemarkan nama baik pejabat negara melalui media sosial.

KOMUNIKASI POLITIK DAN HOAKS DALAM KONTEKS PEMILU 2024

Penelitian (Juditha & Darmawan, 2024) menyoroti dimensi komunikasi politik dalam penyebaran hoaks selama Pemilu Presiden Indonesia 2024, termasuk kasus-kasus yang menyeret Presiden Jokowi. Berdasarkan hasil analisis konten dari situs TurnbackHoax.id selama masa kampanye, ditemukan 135 hoaks yang dikaji, dengan dominasi tema politik (80%). Sebagian besar hoaks berbentuk video (77,78%) dan tergolong sebagai konten menyesatkan (misleading) sebanyak 49,63%. Aktor yang paling banyak diserang adalah Cawapres Gibran (38,52%), Capres Prabowo (37,78%), dan Presiden Jokowi (15,56%). Penelitian ini menegaskan bahwa hoaks bukan sekadar fenomena digital, melainkan merupakan bentuk komunikasi politik yang dimanipulasi untuk membentuk opini publik, menimbulkan ketidakpercayaan, kemarahan, hingga kebencian.

Platform seperti YouTube dan TikTok menjadi media utama penyebaran hoaks, sejalan dengan masifnya penggunaan media sosial dalam kampanye digital. Selain itu, ditemukan pula penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam menciptakan konten hoaks yang seolah-olah otentik. Hal ini memperumit upaya klarifikasi dan memperbesar dampak sosial dari disinformasi.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dan keberadaan tim verifikasi fakta yang bekerja memeriksa kebenaran konten secara aktif. Dari seluruh hoaks yang dianalisis, 94,81% telah dibantah oleh pemeriksa fakta, menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan terhadap klarifikasi publik. Temuan ini memperkaya pembahasan mengenai bagaimana komunikasi politik modern dapat dikendalikan oleh aktor digital yang tidak bertanggung jawab dan bagaimana informasi palsu berperan dalam membentuk lanskap politik di Indonesia.

PERAN ARSIP SEBAGAI BUKTI HUKUM DALAM ISU IJAZAH JOKOWI

Studi yang dilakukan oleh (Meilani et al., 2025) menekankan pentingnya arsip sebagai alat bukti hukum yang sah dan instrumen strategis dalam membentuk opini publik di tengah derasnya disinformasi digital. Mengangkat studi kasus pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, penelitian ini menyimpulkan bahwa arsip fisik maupun digital mampu menjadi alat verifikasi yang legal, otentik, dan krusial dalam meredam spekulasi publik.

Bareskrim Polri, dalam menyikapi tuduhan pemalsuan ijazah, menggelar penyelidikan yang mencakup audit dokumen di 13 titik, termasuk UGM. Verifikasi dilakukan terhadap ijazah, transkrip, skripsi, dan data akademik pembanding. Hasil forensik menyatakan seluruh dokumen memiliki karakteristik penuaan yang konsisten dan validitas hukum.

Penelitian juga menyoroti rendahnya literasi arsip di masyarakat Indonesia. Banyak warga menilai keaslian dokumen hanya dari tampilan visual di media sosial. Analisis komentar Instagram @kumparancom menunjukkan 50% komentar bernada negatif, 35% netral, dan hanya 15% positif (Meilani et al., 2025).

Mayoritas komentar berasal dari masyarakat umum yang belum memahami prosedur verifikasi arsip resmi. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian publik sering kali tidak didasarkan pada dokumen otentik, melainkan persepsi terhadap figur politik. Selain itu, studi ini menyarankan peningkatan peran lembaga pendidikan dan pustakawan dalam edukasi literasi arsip, serta pentingnya digitalisasi dokumen untuk akses cepat, valid, dan terbuka. Melalui pengelolaan arsip yang baik dan kolaborasi antar lembaga, disinformasi dapat ditangkal secara efektif di era digital.

DAMPAK SOSIAL DAN POLITIK

Kontroversi ini memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama lembaga pendidikan dan penegak hukum. Polarisasi politik yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa hoaks dan disinformasi masih menjadi tantangan besar dalam demokrasi digital.

Tuduhan seperti ini bisa menurunkan kredibilitas pejabat publik dan merusak reputasi institusi secara luas jika tidak ditangani secara tegas. Literasi media, edukasi hukum, dan akuntabilitas terbuka menjadi bagian penting untuk meredam dampak jangka panjangnya.

TEORI SEMIOTIKA ROLAND BARTHES DALAM ANALISIS KOMUNIKASI POLITIK

Dalam menelaah dinamika komunikasi politik yang berkembang dalam skandal ijazah Presiden Joko Widodo, pendekatan yang paling relevan dan mendalam adalah **Teori Semiotika Roland Barthes**. Semiotika merupakan cabang ilmu yang mengkaji tanda dan makna, serta bagaimana tanda-tanda tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Roland Barthes, sebagai salah satu tokoh utama dalam teori ini, memformulasikan bahwa makna suatu tanda tidak hanya berhenti pada level literal, tetapi dapat meluas pada level konotatif yang dipengaruhi oleh ideologi dan struktur kekuasaan dalam masyarakat.

Barthes membagi pemaknaan tanda ke dalam dua lapisan utama, yaitu **denotasi** dan **konotasi**.

- a) **Denotasi** adalah makna dasar atau literal dari sebuah tanda, yakni pengertian langsung yang umumnya bersifat objektif dan universal.
- b) **Konotasi**, di sisi lain, merupakan makna tambahan yang muncul akibat pengaruh latar budaya, pengalaman, emosi, nilai, dan ideologi sosial tertentu. Makna ini bersifat lebih subjektif dan kerap kali menjadi cerminan struktur dominasi wacana yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks skandal ijazah Presiden Jokowi, istilah-istilah yang digunakan oleh media maupun netizen seperti "**ijazah palsu**", "**konspirasi elit**", atau akronim satiris seperti "**TIPU UGM**" memiliki dua dimensi makna. Secara denotatif, frasa tersebut dapat dimaknai sebagai informasi atau klaim yang mengarah pada dokumen akademik yang dipertanyakan keasliannya. Namun secara konotatif, frasa-frasa tersebut menyiratkan kecurigaan sistemik, ketidakpercayaan terhadap institusi, serta dugaan manipulasi kekuasaan. Dalam kerangka Barthes, makna konotatif semacam ini disebut sebagai **mitos modern**, yaitu narasi-narasi simbolik yang membentuk pemahaman kolektif masyarakat terhadap suatu fenomena sosial dan politik.

Lebih lanjut, fenomena penggunaan istilah seperti "**diributi**" atau "**disabilitas politik**" menunjukkan praktik **eufemisme linguistik**, yakni upaya media untuk menghaluskan atau mengubah persepsi atas realitas politik yang sebenarnya kompleks dan sensitif. Pemilihan kata dalam narasi media bukanlah tindakan netral, melainkan merupakan bagian dari strategi retorik untuk mengarahkan opini publik. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang membingkai realitas sesuai kepentingan tertentu.

Dengan memanfaatkan kerangka teori semiotika Barthes, artikel ini menganalisis bagaimana media dan masyarakat mengonstruksi makna terhadap isu ijazah Presiden Jokowi, serta bagaimana tanda-tanda linguistik tersebut membentuk persepsi kolektif melalui proses sosial dan budaya. Di tengah era *post-truth*, ketika informasi yang viral kerap kali lebih dipercaya daripada data yang terverifikasi, pemahaman atas mekanisme konotasi dan denotasi menjadi krusial. Hal ini tidak hanya membantu memetakan bagaimana disinformasi bekerja, tetapi juga membuka ruang kritik terhadap konstruksi wacana publik yang sarat manipulasi simbolik.

KESIMPULAN

Skandal dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo mencerminkan kompleksitas dinamika politik, hukum, komunikasi, dan etika kepemimpinan di Indonesia. Meski telah dibuktikan melalui audit forensik dan klarifikasi institusi resmi bahwa ijazah tersebut sah, opini publik tetap terpecah karena pengaruh disinformasi digital, framing media, serta rendahnya literasi arsip dan hukum di masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran isu secara masif di media sosial, terutama melalui konten misleading yang disampaikan secara eupemistis dan bersifat viral, memperbesar dampak sosial dan politik dari kasus ini. Data analisis sentimen dan putusan pengadilan membuktikan adanya polarisasi serta bahaya dari penyebaran hoaks sebagai senjata komunikasi politik.

Dengan demikian, skandal ini bukan semata persoalan keabsahan dokumen, melainkan cerminan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan tantangan terhadap kualitas kepemimpinan di era post-truth. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga hukum, media yang bertanggung jawab, dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk mendorong literasi digital, transparansi arsip, serta perlindungan terhadap integritas demokrasi dan reputasi pejabat publik.

REFERENSI

- Aditya, N. R., & Damarjati, D. (2025). *Begini Foto Ijazah Jokowi yang Diuji Forensik oleh Bareskrim Polri*. Kompas.Com. <https://indeks.kompas.com/profile/7915/Danu.Damarjati>
- Amien, A. R. P. (2021). Media Pembelajaran Mengenai Kosakata Bahasa Jawa Krama Untuk Anak SD Berbasis Animasi Motion Graphic. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 9(2), 185–194. <https://doi.org/10.15294/piwulang.v9i2.47130>
- Antara. (2025a). *Bareskrim Polri nyatakan ijazah universitas Jokowi asli*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/4851265/bareskrim-polri-nyatakan-ijazah-universitas-jokowi-asli?utm_source=chatgpt.com
- Antara. (2025b). *Ijazah Jokowi asli, Bareskrim langsung koordinasi dengan Polda Metro*. Antara. https://manado.antaranews.com/berita/284445/ijazah-jokowi-asli-bareskrim-langsung-koordinasi-dengan-polda-metro?utm_source=chatgpt.com
- Antara. (2025c). *Kasus tuduhan ijazah palsu, polisi klarifikasi SMA dan kampus Jokowi*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/4907685/kasus-tuduhan-ijazah-palsu-polisi-klarifikasi-sma-dan-kampus-jokowi?utm_source=chatgpt.com
- Dyah, A., Putri, K., & Rustamaji, M. (2024). *TELAH RATIO DECIDENDI JUDEX FACTI DALAM MEMUTUS PERKARA PENYEBARAN BERITA PALSU IJAZAH JOKOWI*. 12(3), 100–109.
- Fadilah Kurniawan. (2025). *Polda Metro Periksa Pihak SMA 6 Surakarta-UGM soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi*. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-7969338/polda-metro-periksa-pihak-sma-6-surakarta-ugm-soal-tudingan-ijazah-palsu-jokowi?utm_source=chatgpt.com
- Febrianti, F. (2025). *Terkait Dugaan Penyebaran Berita Bohong Tentang Ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya Klarifikasi UGM dan SMAN 6 Solo*. Strategi.Id. https://www.strategi.id/nusantara/10415378136/terkait-dugaan-penyebaran-berita-bohong-tentang-ijazah-jokowi-polda-metro-jaya-klarifikasi-ugm-dan-sman-6-solo?utm_source=chatgpt.com
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2024). *KOMUNIKASI POLITIK TERKAIT HOAKS PADA PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2024*. *POLITICAL COMMUNICATION RELATED TO HOAXES IN THE 2024*. 167–182. <https://doi.org/10.17933/jskm.2024.5682>
- Khozinudin, A. (2025). *Tanpa Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi, Rakyat Tak Percaya Pengumuman Bareskrim*. RMOL.Id. https://rmol.id/hukum/read/2025/05/23/667453/tanpa-tunjukkan-ijazah-asli-jokowi-rakyat-tak-percaya-pengumuman-bareskrim?utm_source=chatgpt.com
- Khozinudin Ahmad. (2025). *Tanpa Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi, Rakyat Tak Percaya Pengumuman Bareskrim*. RMOL.Id. https://rmol.id/hukum/read/2025/05/23/667453/tanpa-tunjukkan-ijazah-asli-jokowi-rakyat-tak-percaya-pengumuman-bareskrim?utm_source=chatgpt.com
- KompasTv. (2025). *BREAKING NEWS - Bareskrim Polri: Ijazah Jokowi Asli*. KompasTv. https://www.youtube.com/watch?v=y_HEgMCwLVk
- Meilani, N. S., Miswendy, R., Fashihah, J., & Safitri, W. A. (2025). *Arsip Sebagai Bukti Hukum Dalam Isu Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah Presiden Joko Widodo*. 4(2), 129–140.
- Noviansah Wildan. (2025). *4 Laporan Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Ditarik ke Polda Metro, Ini Alasannya*. Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-7960800/4-laporan-tudingan-ijazah-palsu-jokowi-ditarik-ke-polda-metro-ini-alasannya?utm_source=chatgpt.com
- Nurchayanti, R., & Haryoko, H. (2022). Media Pembelajaran Bahasa Jawa Tema Aksara Jawa untuk Siswa SDN Candibaru II. *Respati*, 17(1), 44. <https://doi.org/10.35842/jtir.v17i1.440>
- Pranowo, P., & Susanti, R. (2020). STRATA SOSIAL MASYARAKAT JAWA SEBAGAI BAHASA NONVERBAL STATIS: KAJIAN ETNOPRAGMATIK. *Aksara*, 32(1), 135–150. <https://doi.org/10.29255/aksara.v32i1.548.135-150>
- Pratama Angga Yudha. (2025). *Penyelidikan Ijazah Palsu Presiden Jokowi Berlanjut, Polda Metro Jaya Klarifikasi Data Sekolah dan Kampus*. Merahputih.Com. https://www.merahputih.com/post/read/penyelidikan-ijazah-palsu-presiden-jokowi-berlanjut-polda-metro-jaya-klarifikasi-data-sekolah-dan-kampus?utm_source=chatgpt.com
- Risfil Alfian. (2025). *Hasil Puslabfor Polri Akui Ijazah UGM Jokowi Asli*. Rri.Co.Id. https://www.rri.co.id/hukum/1535013/hasil-puslabfor-polri-akui-ijazah-ugm-jokowi-asli?utm_source=chatgpt.com
- Setyawan Hendra Agus. (2025). *Bareskrim Polri: Ijazah Jokowi Asli*. Kompas.Com. https://www.kompas.id/artikel/bareskrim-polri-ijazah-jokowi-asli?utm_source=chatgpt.com
- Susylowati, E. (2019). KOMUNIKASI ANTARABDI DALEM DI LINGKUNGAN KERATON SURAKARTA HADININGRAT (Communication Among Abdi Dalem in The Palace of Surakarta Hadiningrat). *Suar Betang*, 14(2), 167–181.
- tama, valentino, & tobing, ruth. (2025). *Kasmudjo Bongkar Fakta, Polda Metro Tancap Gas Klarifikasi Ijazah Jokowi ke Sekolah dan UGM*. Seputar Cibubur. https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1789426860/kasmudjo-bongkar-fakta-polda-metro-tancap-gas-klarifikasi-ijazah-jokowi-ke-sekolah-dan-ugm?utm_source=chatgpt.com
- Tempo.co. (2025a). *Fakta-Fakta Penghentian Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi*. Tempo.Co.

- https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-penghentian-kasus-dugaan-ijazah-palsu-jokowi-1543843?utm_source=chatgpt.com
- Tempo.co. (2025b). *Soal Ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya Minta Klarifikasi UGM dan SMAN 6 Surakarta*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/hukum/soal-ijazah-jokowi-polda-metro-jaya-minta-klarifikasi-ugm-dan-sman-6-surakarta--1726908?utm_source=chatgpt.com
- wikipedia. (2025). Joko Widodo university diploma controversy. *Wikipedia.Com*. https://en.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo_university_diploma_controversy?utm_source=chatgpt.com
- Wulandari Oca Meilika , Maulana Irvan , Syamsudin Fatih, W. R. (2025). *PERBANDINGAN ALGORITMA NAIVE BAYES DAN SVM DALAM ANALISIS*. 4(1), 392–400. <https://doi.org/10.70247/jumistik.v4i1.145>
- (Aditya & Damarjati, 2025; Amien, 2021; Antara, 2025c, 2025a, 2025b; Fadilah Kurniawan, 2025; Febrianti, 2025; Khozinudin, 2025; Khozinudin Ahmad, 2025; KompasTv, 2025; Noviansah Wildan, 2025; Nurcahyanti & Haryoko, 2022; Pranowo & Susanti, 2020; Pratama Angga Yudha, 2025; Risfil Alfian, 2025; Setyawan Hendra Agus, 2025; Susylowati, 2019; tama & tobing, 2025; Tempo.co, 2025b, 2025a; wikipedia, 2025)